

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA GUNUNG PUTRI

Hilman Andriansyah

ABSTRAK

Administrasi Kependudukan di Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun membuat pemerintah harus lebih teliti memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dan pesat menimbulkan beragam permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan pembangunan, serta kesejahteraan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan administrasi kependudukan di Desa Gunung Putri sudah mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 37 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ada hanya Perda Desa Gunung Putri No.3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Desa Gunung Putri dan Perwali No. 9 Tahun 2008 tentang Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Desa Gunung Putri. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada bidang pendaftaran penduduk yang meliputi KK, KTP surat pindah, akta kelahiran dan akta kematian sudah berjalan baik.

Kata kunci: Sistem Informasi Kependudukan Desa Gunung Putri

POPULATION ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEM IN GUNUNG PUTRI VILLAGE

Hilman Andriansyah

ABSTRACT

Administration of Population in Indonesia is one of the most important things in development. Increasing the number of people every year makes the government more careful in providing Population Administration services. Rapid and rapid population growth raises a variety of problems in the economic, social, political and development fields, as well as the welfare of the Indonesian nation as a whole. The results showed that the population administration arrangements in Gunung Putri Village had referred to Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration whose implementation is regulated in PP No. 37 of 2007 and Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government whose implementation is regulated in PP No. 38 of 2007. There are no Regional Regulations (Perda) and Mayor Regulations (Perwali) which regulate the administration of population administration, only Gunung Putri Village Regional Regulation No.3 of 2008 concerning Organizational Structure and Work Procedures of the Gunung Putri Village Office and Perwali No . 9 of 2008 concerning Tasks, Functions, and Work Procedures of the Population and Civil Registry Office of Gunung Putri Village. Implementation of Population Administration in the field of population registration which includes KK, moving ID card, birth certificate and death certificate have been going well.

Keywords: Population Information System of Gunung Putri Village